

IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Unit Kerja Eselon IV : KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pemanfaatan aset BMN yang tidak sesuai peruntukan, alokasi BMN yang seharusnya diperuntukkan untuk menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain diluar urusan dukungan pelaksanaan tugas Aset yang cenderung berpotensi digunakan diluar tisi antara lain kendaraan, laptop, handphone, printer, scanner,lcd dan perangkat perkantoran lain termasuk penggunaan sarana kantor untuk keperluan bukan dinas yang dilakukan diluar standar penggunaan yang dibenarkan oleh peraturan.	Semua Pegawai	1. Penggunaan aset oleh pihak lain 2. Penggunaan diluar kepentingan dinas (misalnya untuk usaha/bisnis)	1. Perlu SOP dan monev secara periodik untuk pemeriksaan penggunaan BMN 2. Pembuatan komitmen dari pengguna	
2	Pengangkatan atau pengadaan pegawai kontrak secara tidak terbuka, obyektif dan transparan sehingga pegawai yang diangkat berasal dari bentuk bentuk afiliasi tertentu (saudara, kenalan atau afiliasi lainnya)	Semua pegawai	- Hubungan Afiliasi - Adanya unsur balas budi, gratifikasi	Proses rekrutmen secara terbuka dan transparan dan didokumentasikan	
3	Penentuan alokasi anggaran dipengaruhi oleh kepentingan individu dan golongan, sehingga penentuan anggaran tidak	Pejabat Struktural	Adanya pemberian gratifikasi atau hubungan afiliasi	- Monev terhadap kebutuhan dan efisiensi anggaran secara berkala	

	berdasarkan pada kebutuhan dan ketentuan			- Keputusan dan penentuan alokasi anggaran dibahas semua stake holder dan didokumentasikan.	
4	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak efektif dan efisien: Mekanisme pemilihan penyedia yang tidak sesuai mekanisme pengadaan	Pejabat Pengadaan PPK KPA Bendahara PPSM	Gratifikasi, Afiliasi/Kedekatan	- Keterbukaan mekanisme pengadaan - Pengambilan keputusan dalam pengadaan disampaikan dalam rapat	
5	Pada proses seleksi peserta pelatihan ada kemungkinan cara penetapan peserta yang tidak sesuai kriteria dan ketentuan	- KKLP Penyuluhan - KKLP UKBI	- Hubungan Afiliasi dengan calon peserta - Adanya unsur balas budi, gratifikasi	- Menetapkan kriteria peserta diklat sesuai dengan kriteria dan disepakati dan disahkan bersama	
6	Bias dalam Pemilihan narasumber pada kegiatan yang membutuhkan narasumber dari luar instansi	- Kepala - KKLP Penyuluhan - KKLP UKBI	Hubungan Afiliasi atau gratifikasi	- Melakukan dokumentasi kertas kerja pemilihan narasumber	
7	Penyalahgunaan Jabatan	Pejabat Struktural, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan Kode Etik	
8	Penentuan daerah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan kepada kepentingan pribadi/golongan	Pejabat terkait	- Alasan Kepentingan pribadi - Alasan penyerapan anggaran	Perencanaan perjalanan dinas yang akuntabel	